

SKRIPSI

PENGARUH KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2012 - 2021



**Universitas
Alma Ata**

The Globe Inspiring University

Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Alma Ata Yogyakarta untuk memenuhi syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

ANGKRELIA ANDARISTA NURMANINGTYAS

NIM 192200241

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS

UNIVERSITAS ALMA ATA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is a benchmark for measuring human welfare as a result of the development process in a country or region. This study aims to examine the effect of poverty and economic growth on the Human Development Index (HDI) in the Special Region of Yogyakarta Province in 2012-2021. This study uses the number of poor people as the poverty variable. This study uses secondary data obtained from the publication of BPS Yogyakarta Province. The data used is panel data which is composed of 10 years of time series data from 2016 - 2017 and cross data from 5 districts / cities in Yogyakarta Province. The analysis method used in this research is associative (relationship). Poverty partially has a negative and significant effect on the Human Development Index (HDI) in the Special Region of Yogyakarta Province in 2012-2021. Meanwhile, Economic Growth (X2) has no negative and significant effect on the human development index (Y) of Yogyakarta Special Region Province in 2012-2021.

Keywords: Poverty, Economic Growth, Human Development Index

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan manusia sebagai hasil dari proses pembangunan di suatu negara atau wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021. Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin sebagai variabel kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi BPS Provinsi D.I Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data panel yang tersusun dari data runtut waktu 10 tahun dari 2016 - 2017 dan data silang dari 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan di penelitian ini yaitu *asosiatif* (hubungan). Kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (X2) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Pembangunan Manusia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi pertumbuhan yang bergerak maju untuk mencapai kemajuan, perkembangan ke arah yang lebih baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan. Dipandang sebagai proses multidimensional menyangkut berbagai perubahan struktur sosial, sikap – sikap masyarakat, serta institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia gagasan pembangunan telah diamanatkan dalam alinea IV pembukaan Undang – Undang 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai suatu proses pembangunan dilakukan dengan melihat kebutuhan - kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan perkembangan peradaban, sistem sosial kemasyarakatan dan kemajuan teknologi. Jika ditinjau dari perspektif agama islam pembangunan harus selalu memandang kemaslahatan dunia dan akhirat, oleh karena itu pembangunan harus merujuk atau berdasarkan pada ketentuan syariat. Sesuai dengan Al-qur'an Surat An-Nahl Ayat 97, yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman, Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka dan Kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di tiap negara. Tolak ukur yang digunakan dalam mengetahui kualitas hidup manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diukur melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli).

Pembangunan manusia pada hakekatnya menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan, bermartabat, dan perluasan kapasitas individu atau komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan menekan kemiskinan, yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap daerah. Pembangunan manusia tidak sekedar kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya dan membangun bangsanya. Tingkat IPM menentukan kemampuan dalam menyerap dan mengelola sumber - sumber pertumbuhan ekonomi dan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan manusia. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan

apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki hubungan secara langsung, namun apabila dijadikan satu kebijakan pembangunan yang searah maka akan tercipta suatu kekuatan yang saling dukung, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat efektif memperbaiki pembangunan manusia dan sebaliknya (Anggraini & Muta'ali).

Pertumbuhan ekonomi menurut Islam yakni merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal sesuai syariat Islam. Dalam penelitian Ahmad Yunadi menyatakan bahwa semua ekonomi Islam sepakat hal yang tidak boleh dilakukan dalam ekonomi adalah Maisir, Ghara, dan Riba (Yunadi, 2022).

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika tersebut tidak terpenuhi maka akan binass, Al-Ghazali mengungkapkan ada 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu :1) untuk memenuhi kebutuhan hidup; 2) Untuk Menciptakan Kesejahteraan bagi dirinya maupun keluarga; 3) Untuk membantu sesama muslim yang membutuhkan (Sodiq, 2016).

Fokus utama dalam pemersalahan Pembangunan yakni pembangunan ekonomi ditinjau dari tingkat kemiskinan yang sulit di tekan.. Kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensional. Kemiskinan merupakan kondisi dimana ketidak mampuan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan, dan layanan kesehatan. Definisi pemahaman kemiskinan tersebut, tergolong dalam ke dalam kemiskinan absolut. Kemiskinan

absolut yakni bila pendapatan dibawah garis kemiskinan , yang mengakibatkan keterbatasan dalam memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (Suryawati).

Kemiskinan dalam perspektif islam, fenomena sosial ini sudah ada pada masa Al-Qur'an di turunkan ini mengandung artian bahwa banyak masyarakat yang bergelut dengan kemiskinan dalam jangka waktu yang lama. Kemiskinan bukanlah suatu keadaan yang dikehendaki semua orang, sebab dalam kondisi serba kekurangan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat abu hurairah dari rasullullah SAW yang berbunyi :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّرِّ، وَالْقِلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

“Allahu nma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzahka min 'adzabil qabri la ilaha illa anta”.

Artinya : *“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kemiskinan, kekurangan dan juga kehinaan. Aku berlindung padamu dari perbuatanku untuk menzalimi ataupun untuk terzalimi”.* (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Kefakiran (kemiskinan) sering menjadi pemicu mengantarkan seseorang kepada kekafiran hal ini mungkin terjadi karena mengalami keterhimpitan secara ekonomi sangat rentan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang agama seperti mencuri, melakukan penipuan, berbuat kecurangan, melakukan syirik dan perbuatan lainnya. Sehingga kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dan perlu dicari jalan keluarnya.

Kemiskinan memang masalah yang kompleks. Penyebab kemiskinan ditimbulkan oleh beberapa faktor, yang bersifat multidimensional, seperti korupsi, pendidikan, ketidakstabilan politik, geografis, karakteristik, pemerintahan lokal yang tidak efektif dan kebijakan pemerintah, sebagai penyebab kemiskinan. salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial berbentuk uang, barang atau jasa yang bersumber dari pemerintahan untuk diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin. bantuan sosial berbentuk perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial rehabilitas sosial dan pelayanan dasar (Diana & Seprina, 2019). Namun angka kemiskinan masih saja tinggi dikarenakan Kurangnya Produktivitas. Peran masyarakat miskin menjadi strategis, jika mereka bisa berperan sebagai objek pembangunan dan subjek kemandirian hidup, melalui upaya peningkatan pendapatan. masyarakat miskin di tuntut untuk memiliki produktivitas tinggi agar memiliki pendapatan dan meningkatkan daya beli (Saryana, 2020).

Pembangunan manusia di Indonesia berpengaruh dengan meningkatkan Produktivitas. Melalui pendidikan dan kualitas hidup yang baik akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, jika produktivitas meningkat maka akan meningkat pula pendapatat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan. Manusia berperan penting dalam menciptakan pembangunan dan kesejahteraan yang diinginkan serta manusia

juga dipandang sebagai subjek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021

No	Kemiskinan (%)		Persentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
1	Kota Yogyakarta	2012	9.38
2	Kota Yogyakarta	2013	8.82
3	Kota Yogyakarta	2014	8.67
4	Kota Yogyakarta	2015	8.75
5	Kota Yogyakarta	2016	7.70
6	Kota Yogyakarta	2017	7.64
7	Kota Yogyakarta	2018	6.98
8	Kota Yogyakarta	2019	6.84
9	Kota Yogyakarta	2020	7.27
10	Kota Yogyakarta	2021	7.64
11	Kab. Sleman	2012	10.44
12	Kab. Sleman	2013	9.68
13	Kab. Sleman	2014	9.50
14	Kab. Sleman	2015	9.46
15	Kab. Sleman	2016	7.70
16	Kab. Sleman	2017	7.64
17	Kab. Sleman	2018	7.65
18	Kab. Sleman	2019	7.41
19	Kab. Sleman	2020	8.12
20	Kab. Sleman	2021	8.64
21	Kab. Gunung Kidul	2012	22.72
22	Kab. Gunung Kidul	2013	21.70
23	Kab. Gunung Kidul	2014	20.83
24	Kab. Gunung Kidul	2015	21.73
25	Kab. Gunung Kidul	2016	19.34
26	Kab. Gunung Kidul	2017	18.65
27	Kab. Gunung Kidul	2018	17.12
28	Kab. Gunung Kidul	2019	16.61
29	Kab. Gunung Kidul	2020	17.07
30	Kab. Gunung Kidul	2021	17.69
31	Kab. Bantul	2012	16.97
32	Kab. Bantul	2013	16.48
33	Kab. Bantul	2014	15.89

No	Kemiskinan (X_1)		Persentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
34	Kab. Bantul	2015	16.33
35	Kab. Bantul	2016	14.55
36	Kab. Bantul	2017	14.07
37	Kab. Bantul	2018	13.43
38	Kab. Bantul	2019	12.92
39	Kab. Bantul	2020	13.50
40	Kab. Bantul	2021	14.04
41	Kab. Kulon Progo	2012	23.32
42	Kab. Kulon Progo	2013	21.32
43	Kab. Kulon Progo	2014	20.64
44	Kab. Kulon Progo	2015	21.40
45	Kab. Kulon Progo	2016	20.30
46	Kab. Kulon Progo	2017	20.03
47	Kab. Kulon Progo	2018	18.30
48	Kab. Kulon Progo	2019	17.39
49	Kab. Kulon Progo	2020	18.01
50	Kab. Kulon Progo	2021	18.38

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan BPS Yogyakarta yakni Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,64 persen mengalami kenaikan 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. Penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 14,00 persen mengalami kenaikan 0,35 persen poin dibandingkan Maret 2022.

KOMPAS.com_ menerbitkan artikel Tingkat kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) disebut sulit untuk diturunkan (Ramli,2021).

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012- 2021

No	Pertumbuhan Ekonomi (X_2)		Persentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
1	Kota Yogyakarta	2012	5.47
2	Kota Yogyakarta	2013	5.28
3	Kota Yogyakarta	2014	5.28
4	Kota Yogyakarta	2015	5.09
5	Kota Yogyakarta	2016	5.11
6	Kota Yogyakarta	2017	5.24
7	Kota Yogyakarta	2018	5.49
8	Kota Yogyakarta	2019	5.96
9	Kota Yogyakarta	2020	-2,42
10	Kota Yogyakarta	2021	5.09
11	Kab. Sleman	2012	5.89
12	Kab. Sleman	2013	5.30
13	Kab. Sleman	2014	5.30
14	Kab. Sleman	2015	5.18
15	Kab. Sleman	2016	5.22
16	Kab. Sleman	2017	5.34
17	Kab. Sleman	2018	6.42
18	Kab. Sleman	2019	6.49
19	Kab. Sleman	2020	-3,91
20	Kab. Sleman	2021	5.56
21	Kab. Gunung Kidul	2012	4.97
22	Kab. Gunung Kidul	2013	4.54
23	Kab. Gunung Kidul	2014	4.54
24	Kab. Gunung Kidul	2015	4.82
25	Kab. Gunung Kidul	2016	4.88
26	Kab. Gunung Kidul	2017	5.01
27	Kab. Gunung Kidul	2018	5.16
28	Kab. Gunung Kidul	2019	5.33
29	Kab. Gunung Kidul	2020	-0,68
30	Kab. Gunung Kidul	2021	5.22
31	Kab. Bantul	2012	5.46
32	Kab. Bantul	2013	5.04

No	Pertumbuhan Ekonomi (X ₂)		Persentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
33	Kab. Bantul	2014	5.04
34	Kab. Bantul	2015	4.97
35	Kab. Bantul	2016	5.05
36	Kab. Bantul	2017	5.10
37	Kab. Bantul	2018	5.47
38	Kab. Bantul	2019	5.53
39	Kab. Bantul	2020	-1,66
40	Kab. Bantul	2021	4.97
41	Kab. Kulon Progo	2012	4.87
42	Kab. Kulon Progo	2013	4.57
43	Kab. Kulon Progo	2014	4.57
44	Kab. Kulon Progo	2015	4.62
45	Kab. Kulon Progo	2016	4.76
46	Kab. Kulon Progo	2017	5.97
47	Kab. Kulon Progo	2018	10.84
48	Kab. Kulon Progo	2019	13.49
49	Kab. Kulon Progo	2020	-4,06
50	Kab. Kulon Progo	2021	4.33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi setiap Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan penurunan terendah terjadi tahun 2020. Masa dimana terjadinya pandemi yang menggemparkan dunia Covid-19 dimana menghambat produktivitas karena social distancing, mempengaruhi pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Pertumbuhan Ekonomi. Dan pada tahun 2021 sudah mengalami perbaikan ekonomi dengan adanya kenaikan.

Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat mempengaruhi realisasi belanja dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Rusandi, 2018).

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2021

No	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)		Presentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
1	Kota Yogyakarta	2012	83.29
2	Kota Yogyakarta	2013	83.61
3	Kota Yogyakarta	2014	83.78
4	Kota Yogyakarta	2015	84.56
5	Kota Yogyakarta	2016	85.32
6	Kota Yogyakarta	2017	85.49
7	Kota Yogyakarta	2018	86.11
8	Kota Yogyakarta	2019	86.65
9	Kota Yogyakarta	2020	86.61
10	Kota Yogyakarta	2021	87.18
11	Kab. Sleman	2012	80.10
12	Kab. Sleman	2013	80.26
13	Kab. Sleman	2014	80.73
14	Kab. Sleman	2015	81,2
15	Kab. Sleman	2016	82.32
16	Kab. Sleman	2017	82.85
17	Kab. Sleman	2018	83.42
18	Kab. Sleman	2019	83.85
19	Kab. Sleman	2020	83.84
20	Kab. Sleman	2021	84.00
21	Kab. Gunung Kidul	2012	65.69
22	Kab. Gunung Kidul	2013	66.31
23	Kab. Gunung Kidul	2014	67.03
24	Kab. Gunung Kidul	2015	67.41
25	Kab. Gunung Kidul	2016	67.82
26	Kab. Gunung Kidul	2017	68.73
27	Kab. Gunung Kidul	2018	69.24
28	Kab. Gunung Kidul	2019	69.96
29	Kab. Gunung Kidul	2020	69.98

No	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y)		Presentasi
	Kabupaten/Kota	Tahun	
30	Kab. Gunung Kidul	2021	70.16
31	Kab. Bantul	2012	76.13
32	Kab. Bantul	2013	76.78
33	Kab. Bantul	2014	77.11
34	Kab. Bantul	2015	77,99
35	Kab. Bantul	2016	78.42
36	Kab. Bantul	2017	78.67
37	Kab. Bantul	2018	79.45
38	Kab. Bantul	2019	80.01
39	Kab. Bantul	2020	80.01
40	Kab. Bantul	2021	80.28
41	Kab. Kulon Progo	2012	69.74
42	Kab. Kulon Progo	2013	70.14
43	Kab. Kulon Progo	2014	70.68
44	Kab. Kulon Progo	2015	71.52
45	Kab. Kulon Progo	2016	72.38
46	Kab. Kulon Progo	2017	73.23
47	Kab. Kulon Progo	2018	73.76
48	Kab. Kulon Progo	2019	74.44
49	Kab. Kulon Progo	2020	74.46
50	Kab. Kulon Progo	2021	74.71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat Indeks pembangunan Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 10 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai poin 80,22 dimana angka tersebut tergolong tinggi untuk IPM suatu Wilayah. Keadaan ini tidak terlihat seperti adanya kemiskinan yang ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana setiap tahunnya terjadi fluktuasi sedangkan situasi tersebut Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup berarti. Di lapangan masih banyak masalah sosial serta ekonomi terutama kemiskinan yang

masih menjadi masalah utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di setiap Kabupatennya.

Berdasarkan Dari Latar Belakang di atas, maka saya ingin meneliti
**“PENGARUH KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan dari penelitian ini, adalah:

1. Jumlah kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021 mengalami kenaikan walau tidak besar.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut maka muncul rumusan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021?

3. Bagaimana pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dilakukannya penelitian ini mampu memberikan pengalaman bagi peneliti serta pengetahuan baru terkait kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.

2. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa terlebih mengetahui apa pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan

ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri. Dan dapat mengetahui bagaimana cara mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah terkait dengan Menekan angka Kemiskinan. Sekaligus mengetahui seberapa besar kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi langkah apa yang perlu diambil pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah. *Cetakan Pertama*, 4.
- Anggraini, R. A., & Muta'ali, L. (2013). Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 1(1), 1–16.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2017). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo*.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau. *JOM Fekon*, Vol.4 No.1 (Februari) 2017, 4, 870–882.
- Diana, D., & Seprina, I. (2019). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighed Product Method (WPM). *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 5(3), 370. <https://doi.org/10.26418/jp.v5i3.34971>
- Fadhila, A. (2017). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 38–47.
- Ketaren, Y. B. (2020). *Kemiskinan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 - 2019*.
- Khumaini, S., & Hussein, M. T. (2020). Persepsi Dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah Di Kabupaten Tangerang. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 86. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).86-93](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).86-93)
- Kurniawati. (2017). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Sc.Sy.kumarjati.Ac.Id*, 1–13.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Nasrifudin, M. (2016). Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(2), 219. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan,

Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>

Maulana, R., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.57301>

PASULOL, Q. (2020). *Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar*. 1–88.

Prayoga, M. L., Muchtolifah, N., & Sinadiyati, S. (2021). Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jumbana Economic Education Journal*, 3(2), 135–142. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058>

Priadana, M. S., & Sularsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.

Rahayu, nia ardania. (2019). *Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2017*. 99.

Ramli, K. (2021). Yogyakarta Disebut Sulit Turunkan Tingkat Kemiskinan, Ini Sebabnya. in *Kompas*.

Rusandi, T. Y. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Saryana. (2020). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.

Sayifullah, S., & Gandasari, T. K. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 233–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>

Seneweb, J., Roinsulu, D. C., & Lopian, A. L. C. P. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 9(3), 173–183.

Sempunan, L. P. (2004). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004*. 1, 1–67.

Siti Nur Fatimah. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.

Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.

Statistik Yogyakarta, B. P. (2022). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022*. 4(1), 64–75.

Suharsimi Arikunto. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Pustaka Pelajar.

Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. 08(03), 121–129.

Syofyan, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>

Wahid Murni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif*. 14.

Yunadi, A. (2022). Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Fiqah Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 77–89.

ZA, D. F., Junaidi, J., & Bhakti, A. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-provinsi di Sumatera. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 8(3), 170–183. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i3.11994>